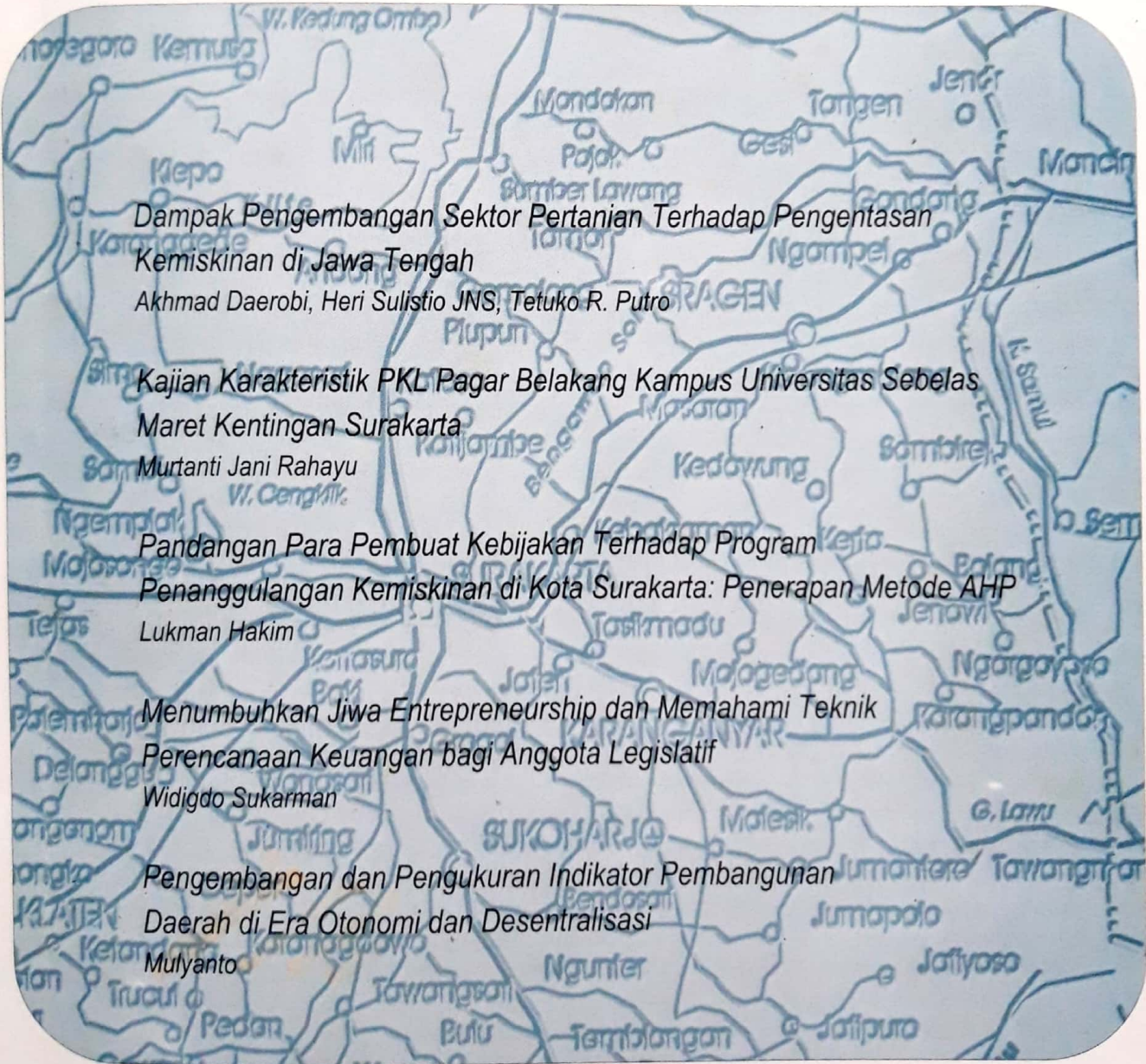


# Region

Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif



*Dampak Pengembangan Sektor Pertanian Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah*  
Akhdad Daerobi, Heri Sulistio JNS, Tetuko R. Putro

*Kajian Karakteristik PKL Pagar Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret Kentingan Surakarta*  
Murtanti Jani Rahayu

*Pandangan Para Pembuat Kebijakan Terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surakarta: Penerapan Metode AHP*  
Lukman Hakim

*Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship dan Memahami Teknik Perencanaan Keuangan bagi Anggota Legislatif*  
Widigdo Sukarman

*Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*  
Mulyanto



**Penanggungjawab:** Ketua LPPM UNS, Surakarta

**Pemimpin Penyunting:** Fauzan Ali Ikhsan, ST,MT

**Wakil Pemimpin Penyunting:** Lukman Hakim, SE.,M.Si

**Penyunting Ahli:**

Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D (UNS)

Ir. Holy Bina Wijaya, MUM (UNDIP)

Pieter Abdullah, SE., MA. (Bank Indonesia)

**Penyunting Pelaksana:**

Heri Sulistyono Jati, SE

**Tata Usaha:**

Ir. Ana Hardiana, MT

**Alamat Sekretariat:**

PUSAT INFORMASI DAN PEMBANGUNAN WILAYAH  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Urip Sumoharjo No. 110 Surakarta telp. 0271 - 635901, faks. 0271 - 635902

email : pipw@uns.ac.id Website : www.lppm.uns.ac.id

---

**Region**, diterbitkan oleh Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) UNS Surakarta mulai tahun 2006; berisi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, resensi buku, yang kesemuanya berada dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota serta perencanaan partisipatif. Jurnal terbit dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Redaksi menerima tulisan ilmiah dalam bidang-bidang yang relevan dengan masalah perencanaan wilayah dan kota serta pembangunan daerah, dengan ketentuan sebagaimana dalam Panduan pada sampul belakang dalam. Naskah yang masuk akan dievaluasi oleh Dewan Penyunting. Redaksi berhak melakukan perubahan pada tulisan yang layak muat demi konsistensi gaya, namun tanpa merubah maksud isinya. Hak cipta intelektual dari tulisan tetap melekat pada Penulis.

## DAFTAR ISI

Dampak Pengembangan Sektor Pertanian Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Tengah <i>Akhmad Daerobi, Heri Sulistio JNS, Tetuko R. Putro</i>	1 - 24
Kajian Karakteristik PKL Pagar Belakang Kampus UNS Kentingan Surakarta <i>Murtanti Jani Rahayu</i>	25 - 34
Pandangan Para Pembuat Kebijakan Terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Surakarta: Penerapan Metode AHP <i>Lukman Hakim</i>	35 - 42
Menumbuhkan Jiwa <i>Entrepreneurship</i> dan Memahami Teknik Perencanaan Keuangan Bagi Anggota Legislatif <i>Widigdo Sukarman</i>	43 - 52
Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi <i>Mulyanto</i>	53 - 66



# PENGEMBANGAN DAN PENGUKURAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAN DESENTRALISASI

MULYANTO

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA

**Abstract:** *The purpose of this research is to construct the model to measure the progress of regional development in autonomy and decentralization era. The data used in this study were adopted from the time series secondary data of some indicators that classified into three indicators, namely: (i) GCI (Government Capacity Indicators/Index); (ii) DDI (District Development Indicators/Index); and (iii) CEI (Community Empowerment Indicators/Index). These indicators will be composed into index, namely RDI (Regional Development Index).*

*Using the secondary data for three years (2001, 2002 and 2003), collected from 26 subdistricts in Klaten Regency; the results of this study as follows: (i) There was a statistically significant evidence of RDI during year 2001 to 2003 among 26 subdistricts in Klaten Regency; (ii) GCI has provided a great contribution to RDI compared with DDI and CEI; (iii) Subdistricts such as Delanggu, South Klaten, Central Klaten, and North Klaten have a great index compared with the other. On the contrary, subdistricts such as Cawas, Wonosari, Wedi, Prambanan and Bayat have a inferior index.*

**Keywords:** *Regional Development Index*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang ditandai dengan semangat desentralisasi kewenangan (*power sharing*) dan desentralisasi keuangan (*fiscal decen-tralization*) mulai dilaksanakn secara penuh sejak awal tahun 2001, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; yang sekarang ini, kedua UU tersebut telah dirubah menjadi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Di lain pihak, pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya diarahkan dan ditujukan untuk

meningkatkan pelayanan (*service delivery*) Pemerintah Daerah (*local government*) kepada masyarakat (*social community*) agar lebih efisien dan responsif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing daerah. Cara yang ditempuh yaitu dengan meningkatkan hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri, tetapi masih berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, kewenangan Pemerintah Pusat menjadi semakin berkurang dan akan lebih berperan sebagai *fasilitator* sekaligus *evaluator* kepada seluruh Pemerintah Daerah (baik Propinsi, Kabupaten dan Kota) atas pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dan sedang berjalan. Peran sebagai *fasilitator* dan *evaluator*,



khususnya sangat terasa dalam beberapa aspek, seperti: (i) Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Wilayah; (ii) Kebijakan tentang Perencanaan Nasional dan Pengendalian Pembangunan Nasional secara makro; (iii) Penetapan Dana Perimbangan Keuangan dan sebagainya (Bappenas 2001).

Dalam konteks Pemerintah Daerah, sangat mendesak untuk dilakukan suatu penelitian/pengkajian yang dapat menghasilkan suatu indikator atau tepatnya indeks yang menunjukkan bobot/besaran nilai mengenai suatu hal; sebagaimana Pemerinatah Pusat telah melakukannya ketika membagi dan mengalokasikan besaran DAU (Dana Alokasi Umum) kepada Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Di lain piak, pembangunan daerah sendiri sering diartikan sebagai suatu proses yang berdimensi banyak yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan daerah, semisal percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan faktor penentu lainnya. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memperluas kesempatan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan hubungan antar daerah/wilayah serta terus diupayakan adanya proses pergeseran kegiatan ekonomi dari Sektor Primer (Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan/ Penggalian); menuju ke Sektor Industri (Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Bangunan); ke Sektor Utilitas (Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih/Minum; dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi); serta ke Sektor Jasa (Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sektor Sewa Rumah, Sektor

Pemerintahan dan Pertahanan, serta Sektor Jasa Lainnya).

Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik diperlukan dukungan sistem informasi yang relevan, serta dibutuhkan pengetahuan tentang indikator-indikator pembangunan dari hasil pembangunan itu sendiri. Penyusunan indikator-indikator pembangunan dapat dilakukan dari berbagai pendekatan dan kepentingan, yang antara lain berupa pendekatan menurut bidang pembangunan, menurut sektor-sektor pembangunan dan juga menurut kepentingan yang lain. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) pada beberapa waktu yang lalu menggunakan indikator pembangunan yang dikategorikan ke dalam indikator bidang ekonomi, indikator sosial, dan indikator fisik prasarana.

Di lain pihak, perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sebagai suatu kerangka yang rasional harus mempunyai tolok ukur untuk mengantisipasi dan memberikan arah bagi proses kebijakan pembangunan. Dalam dokumen Propenas (Program Pembangunan Nasional) Tahun 2000-2004; disebutkan bahwa pembangunan merupakan proses yang melibatkan keterkaitan antara faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Meskipun dalam jangka pendek sulit dikatakan mana yang lebih dominan (apakah faktor ekonomi atau faktor non-ekonomi); namun banyak yang berpendapat bahwa faktor non-ekonomi di dalam jangka panjang, khususnya yang terjadi di Negara Sedang Berkembang termasuk Indonesia; relatif akan berpengaruh terhadap proses pembangunan.



Saat ini dikembangkan indikator-indikator lain yang cukup luas, yang tidak sekedar indikator PDB/PDRB, namun sudah mencakup dimensi dan aspek lain selain faktor ekonomi.

Indikator-indikator tersebut secara umum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (i) Indikator yang mencakup hasil interaksi dari berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu pola normal atau pola optimal; dan (ii) Indikator yang menangkap kualitas hidup. Secara ringkas indikator pembangunan daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: (i) indikator ekonomi; (ii) indikator non ekonomi; serta (iii) indikator gabungan. Indikator pembangunan semacam PQLI (*Physical Quality of Life Index*); HDI (*Human Development Index*); dan juga RDI (*Regional Development Index*) termasuk dalam kategori indikator gabungan.

Dengan menggunakan data-data sekunder di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten selama tahun 2001-2003; tujuan dari pengkajian ini adalah untuk menyusun dan menghasilkan suatu dokumen yang memuat indeks-indeks kemajuan suatu daerah/kecamatan, yang mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pelaksanaan Otonomi dan Pembangunan Daerah. Adapun tujuan secara rinci, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan suatu indeks umum yang disebut sebagai IPD (Indeks Pembangunan Daerah) yang dihasilkan dari proses dekomposisi / pembobotan dari 3 (tiga) sub indikator, yaitu: (a) Sub Indikator Kapasitas Pemerintahan; (b) Sub Indikator Perkembangan Wilayah; dan (c) Sub Indikator Keberdayaan Masyarakat.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Sub Indikator Kapasitas

Pemerintahan di tingkat kecamatan, yang mencakup: (a) Aspek Kapabilitas Aparat; (b) Aspek Keuangan Daerah; serta (c) Aspek Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis Sub Indikator Perkembangan Wilayah di tingkat kecamatan, yang mencakup: (a) Aspek Fasilitas Publik; (b) Aspek Ekonomi Wilayah; serta (c) Aspek Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis Sub Indikator Keberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan, yang mencakup: (a) Aspek Kependudukan dan Ketenagakerjaan; (b) Aspek Kesejahteraan; serta (c) Aspek Sosial Politik dan Budaya.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang sekaligus menjadi dasar terhadap arah pengkajian ini, dirumuskan sebagai berikut:

1. Besaran IPD (Indeks Pembangunan Daerah) secara total di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten selama tahun 2001-2003 diduga mengalami perbedaan secara nyata, sebagai akibat dari penerapan kebijakan pembangunan daerah yang diberlakukan.
2. Besaran Sub IKP (Indikator Kapasitas Pemerintahan) di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten selama tahun 2001-2003 diduga mengalami perbedaan secara nyata, sebagai akibat dari penerapan kebijakan pembangunan daerah yang diberlakukan.
3. Besaran Sub IPW (Indikator Perkembangan Wilayah) di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten selama tahun 2001-2003 diduga



mengalami perbedaan secara nyata, sebagai akibat dari penerapan kebijakan pembangunan daerah yang diberlakukan.

4. Besaran Sub IKM (Indikator Keberdayaan Masyarakat) di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten selama tahun 2001-2003 diduga mengalami perbedaan secara nyata, sebagai akibat dari penerapan kebijakan pembangunan daerah yang diberlakukan.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengkajian dan analisis serta penyusunan IPD (Indeks Pembangunan Daerah) atau RDI (*Regional Development Index*), yang diterapkan di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat perbandingan mengenai tingkat kemajuan pembangunan antar daerah maupun antar waktu di Kabupaten Klaten pada umumnya, dan di 26 kecamatan pada khususnya.
2. Sebagai alat advokasi dan juga alat evaluasi mengenai tingkat perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Klaten pada umumnya, dan pembangunan daerah di 26 kecamatan pada khususnya.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kerangka kerja di dalam perencana-an pembangunan, sebagai alat evaluasi mengenai pemekaran/pengga-bungan/penghapusan suatu wilayah kecamatan, alat penentuan prioritas dan perhitungan alokasi pembiayaan pembangunan; dan sebagainya.

## METODE PENELITIAN

Beberapa tahap yang akan dilaksanakan terkait dengan kegiatan pengkajian dan analisis serta penyusunan IPD (Indeks Pembangunan Daerah) atau RDI (*Regional Development Index*) di Kabupaten Klaten, antara lain meliputi:

### 1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data untuk menunjang kegiatan penyusunan dan penghitungan Indeks Pembangunan Daerah (*Regional Development Index*) di Kabupaten Klaten, dilakukan dengan cara:

- a. **Studi Pustaka**, yaitu pengumpulan data-data sekunder dari berbagai dokumen di lingkungan pemerintahan di Kabupaten Klaten, seperti Klaten Dalam Angka; Perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto); dan sumber-sumber lain yang terkait dan relevan.
- b. **Survey Lapangan**, yaitu melakukan observasi langsung kepada pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Klaten, terkait dengan pencarian data-data pembentuk IPD (Indeks Pembangunan Daerah).
- c. **Wawancara, Diskusi dan Konsultasi Nara Sumber**, yaitu dengan melakukan pengkajian bersama dengan menghadirkan nara sumber dari unit kerja atau instansi di Lingkungan pemerintahan di Kabupaten Klaten, terutama masukan dari tenaga ahli terkait untuk mendapatkan data-data dan informasi yang mendukung dicapainya berbagai variabel pembentuk



IPD (Indeks Pembangunan Daerah).

## 2. Cakupan Studi

Cakupan dalam pengkajian dan analisis serta penyusunan IPD (Indeks Pembangunan Daerah) di Kabupaten Klaten, di bagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. **Inventarisasi Data-data Pendukung Indikator**, yaitu melakukan pengumpulan data yang terkait dengan pembuatan berbagai indikator dan sub indikator yang dikelompokkan ke dalam: (i) Indikator Kapasitas Pemerintah; (ii) Indikator Perkembangan Wilayah; serta (iii) Indikator Keberdayaan Masyarakat
- b. **Penetapan Sub-Sub Indikator**, yaitu mencari sub-sub indikator yang menyertai ketiga indikator utama, yang kemudian disertai dengan pembo-botan nilai-nilai numerik intensitasnya.
- c. **Penghitungan rating/peringkat**, yaitu melakukan serangkaian perhitungan sampai didapatkannya IPD (Indeks Pembangunan Daerah) atau RDI (*Regional Development Index*) di Kabupaten Klaten dan sekaligus mela-kukan pemingkatan atas nilai-nilai indeks yang telah dihasilkan, serta menguji ada tidaknya selama kurun waktu 2001-2003.

## 3. Model Studi/Pengkajian

Model studi yang digunakan di dalam penyusunan dan perumusan IPD (Indeks Pembangunan Daerah) di Kabupaten Klaten adalah kajian data statistik dengan model skoring,

Perhitungan bobot kriteria dan sub kriteria tidak dilakukan dengan penelitian secara tersendiri, namun mengadopsi dan menggunakan hasil studi yang telah dilakukan Bappenas (2001), yang meliputi 3 (tiga) indikator global yaitu: (i) Kriteria Kapabilitas Pemerintah; (ii) Kriteria Perkembangan Wilayah; dan (iii) Kriteria Keberdayaan Masyarakat.

Penentuan bobot atas kriteria dan sub kriteria yang dilakukan oleh Bappenas (2001), didasarkan atas survey terhadap para pakar di bidangnya masing-masing (sekitar 15 orang), yang terdiri dari para pejabat dan staf perencanaan di lingkungan Deputy Bidang Regional dan Sumber Daya Alam Bappenas serta beberapa pakar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Perangkat survey yang digunakan adalah kuesioner model AHP (*Analytical Hierarchy Procces*), dan perangkat lunak EC (*Expert Choice*). Kuesioner yang sudah disebarakan untuk diisi oleh para pakar terkait, dan hasilnya dimasukkan atau dianalisis dengan menggunakan Program EC.

Bobot dibuat untuk membandingkan kriteria yang satu dengan yang lain, menurut urutan mana yang lebih penting. Bobot juga dibuat untuk memban-dingkan sub kriteria yang satu dengan yang lain pada masing-masing kriteria berdasarkan urutan mana yang lebih penting. Bobot tersebut berupa nilai dan jumlahnya sama dengan 1 (satu) untuk setiap level atau tingkat pada hierarki. Setelah bobot diperoleh, maka bobot ini akan digunakan untuk menentukan IPD (Indeks Pembangunan Daerah) yang mengukur tingkat kemajuan pembangunan daerah di suatu wilayah kabupaten/kota.



## HASIL PENELITIAN

### 1. IPD (Indeks Pembangunan Daerah) Total

Seperti yang telah dirumuskan dalam Gambar 2.2, besaran IPD Total merupakan hasil dari dekomposisi 3 (tiga) Sub Indeks, yaitu: (i) Sub IKP (Indeks Kapasitas Pemerintahan); (ii) Sub IPW (Indeks Perkembangan Wila-yah); dan (iii) Sub IKM (Indeks Keberdayaan Masyarakat). Dari hasil perhi-tungan atau uji-F (*F-test*) didapatkan nilai sebesar 5,1814; dan signifikan pada taraf 1% (tingkat kebenaran 99%). Hal ini mengindikasikan bahwa IPD Total di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, selama 3 (tahun) berturut-turut, yaitu tahun 2001; 2002; dan 2003 secara statistik berbeda. Dari hasil analisis yang telah dilakukan juga menunjukkan adanya peningkatan dalam rerata indeks, yaitu dari sebesar 3,5349 pada tahun 2001; meningkat menjadi sebesar 4,0754 pada tahun 2002; dan meningkat lagi menjadi 4,7643 pada tahun 2003.

Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Selatan; Kecamatan Klaten Tengah, dan Kecamatan Delanggu; merupakan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Klaten yang selama periode 2001-2003 masuk dalam kategori atau peringkat 5 (lima) besar IPD Total. Keempat kecamatan ini, masuk dalam kategori kecamatan-kecamatan yang sudah maju dan berada di kawasan perkotaan. Sementara itu, Kecamatan Wedi dan Kecamatan Prambanan masuk dalam kategori kecamatan dengan IPD Total yang rendah. Kecamatan Wedi terus mengalami kenaikan peringkat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, yaitu dari peringkat ke-26 pada tahun 2001; naik menjadi peringkat ke-25 pada tahun 2002; dan menjadi peringkat ke-24 pada tahun 2003. Di lain pihak untuk Kecamatan Prambanan, yang

pada tahun 2001 menduduki peringkat ke-25, pada tahun 2002 turun ke peringkat 26, serta pada tahun 2003 naik lagi ke peringkat 23.

Besaran indeks secara absolut (nilai mutlak) yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak mengalami peningkatan adalah: (i) Kecamatan Bayat; (ii) Kecamatan Tulung; (iii) Kecamatan Klaten Utara; dan (iv) Kecamatan Klaten Tengah. Tiga kecamatan yang pertama, IPD Total pada tahun 2002 lebih rendah dibanding tahun 2001, sedang untuk Kecamatan Klaten Tengah, IPD Total pada tahun 2003 lebih rendah dibanding dengan kondisi di tahun 2002.

Dari berbagai paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah di Kabupaten Klaten yang dikaitkan dengan upaya untuk selalu meningkatkan IPD Total, secara umum telah berdampak pada kenaikan indeks, meskipun ada 4 (empat) kecamatan yang secara absolut tidak mengalami tren yang selalu meningkat selama tahun 2001-2003. Dari hasil perhitungan KV (Koefisien Variasi) juga telah temukan bahwa variasi atau penyebaran rerata indeks terhadap SD (Standar Deviasinya) semakin menurun, yaitu dari sebesar 0,4046 (atau sebesar 40,46%) pada tahun 2001; menjadi sebesar 0,3518 (atau sebesar 35,18%) pada tahun 2002; serta menjadi 0,2668 (atau sebesar 26,68%) pada tahun 2003. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan di Kabupaten Klaten yang terkait dengan upaya untuk mengurangi ketimpangan kemajuan pembangunan antar kecamatan semakin baik.

### 2. Sub IKP (Indeks Kapasitas Pemerintahan)

Seperti yang telah dirumuskan dalam Gambar 2.2, besaran Sub IKP



merupakan hasil dekomposisi dari 3 (tiga) Sub Indeks, yaitu: (i) Sub IKA (Indeks Kapabilitas Aparat); (ii) Sub IKD (Indeks Keuangan Daerah); dan (iii) Sub ISP (Indeks Sarana dan Prasarana Pemerintahan). Dari hasil perhitungan atau uji-F (*F-test*) didapatkan nilai sebesar 10,4332; dan signifikan pada taraf 1% (tingkat kebenaran 99%). Hal ini mengindikasikan bahwa Sub IKP di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, selama 3 (tahun) berturut-turut, yaitu tahun 2001, 2002, dan 2003 secara statistik berbeda. Secara umum memang telah terjadi peningkatan dalam rerata indeks, yaitu dari sebesar 7,9010 pada tahun 2001; menjadi sebesar 9,3208 pada tahun 2002; dan menjadi sebesar 11,5829 pada tahun 2003.

Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Selatan; Kecamatan Delanggu, dan Kecamatan Klaten Tengah; merupakan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Klaten yang selama periode 2001-2003 masuk dalam kategori atau peringkat 5 (lima) besar dalam Sub IKP. Keempat kecamatan ini, masuk dalam kategori kecamatan-kecamatan yang sudah maju dan terletak di kawasan perkotaan. Sementara itu, Kecamatan Wedi dan Kecamatan Prambanan masuk dalam kategori kecamatan dengan IPD Total yang rendah. Kecamatan Wedi terus mengalami kenaikan peringkat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, yaitu dari peringkat ke-26 pada tahun 2001; naik menjadi peringkat ke-23 pada tahun 2002; dan menjadi peringkat ke-22 pada tahun 2003. Di lain pihak untuk Kecamatan Prambanan, yang pada tahun 2001 menduduki peringkat ke-25, pada tahun 2002 turun ke peringkat 26, serta pada tahun 2003 naik lagi ke peringkat 24. Dari gambaran di atas, ternyata ada hubungan yang menarik antara IPD Total dengan Sub IKP,

dimana besarnya IPD Total banyak disumbang dari Sub IKP.

Besaran indeks secara absolut (nilai mutlak) yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak mengalami peningkatan adalah: (i) Kecamatan Bayat; (ii) Kecamatan Tulung; (iii) Kecamatan Klaten Utara; dan (iv) Kecamatan Klaten Tengah. Tiga kecamatan yang pertama, Sub IKP pada tahun 2002 lebih rendah dibanding tahun 2001, sedang untuk Kecamatan Klaten Tengah, IPD Total pada tahun 2003 lebih rendah dibanding dengan kondisi di tahun 2002.

Dari berbagai paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten yang dikaitkan dengan upaya meningkatkan Sub IKP, secara umum telah berdampak pada kenaikan indeks, meskipun ada 4 (empat) kecamatan yang secara absolut tidak mengalami tren yang selalu naik dari tahun 2001-2003. Dari hasil perhitungan KV (Koefisien Variasi) juga ditemukan bahwa ada kecenderungan yang semakin menurun, yaitu dari sebesar 0,3872 (atau sebesar 38,72%) pada tahun 2001; menjadi sebesar 0,3140 (atau sebesar 31,40%) pada tahun 2002; serta menjadi sebesar 0,2440 (atau sebesar 24,40%) pada tahun 2003. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan di Kabupaten Klaten yang terkait dengan masalah kapasitas pemerintah semakin membaik.

### 3. Sub IPW (Indeks Perkembangan Wilayah)

Seperti yang telah dirumuskan dalam Gambar 2.2, besaran Sub IPW merupakan hasil dekomposisi dari 3 (tiga) Sub Indeks, yaitu: (i) Sub IFP (Indeks Fasilitas Publik); (ii) Sub IEW (Indeks Ekonomi Wilayah); dan (iii) Sub IFL (Indeks Kondisi Fisik,



Lingkungan Hidup dan SDA). Dari hasil perhitungan atau uji-F (*F-test*) didapatkan nilai sebesar 0,2461; dan tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk Sub IPW di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten secara statistik tidak mengalami perbedaan selama 3 (tahun) berturut-turut, yaitu tahun 2001; 2002; dan 2003. Secara umum memang tidak terjadi perbedaan yang menyolok dalam rerata indeksinya, yaitu dari sebesar 1,5283 pada tahun 2001; naik menjadi sebesar 1,6426 pada tahun 2002; dan turun lagi menjadi sebesar 1,4338 pada tahun 2003. Hal ini mengindikasikan bahwa dibanding tahun 2001, Sub IPW pada tahun 2003 lebih buruk dan secara juga statistik tidak signifikan.

Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Utara; Kecamatan Ceper, dan Kecamatan Klaten Selatan; merupakan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Klaten yang selama periode 2001-2003 masuk dalam kategori atau peringkat 5 (lima) besar dalam Sub IPW. Keempat kecamatan ini, masuk dalam kategori kecamatan-kecamatan yang sudah maju dan terletak di kawasan perkotaan. Sementara itu, Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Ngawen masuk dalam kategori kecamatan dengan Sub IPW yang rendah. Kecamatan Ngawen pada tahun 2001 dan 2002 berada pada peringkat ke-22, sedang pada tahun 2003 turun ke peringkat 24. Sedang untuk Kecamatan Jatinom tahun 2001 dan 2003 berada pada peringkat ke-25, meskipun pada tahun 2002 sempat berada pada peringkat ke-24.

Besaran indeks secara absolut (nilai mutlak) yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mengalami peningkatan adalah: (i) Kecamatan Gantiwarno; (ii) Kecamatan Wedi; (iii) Kecamatan Ceper; (iv) Kecamatan Delanggu; (v) Kecamatan

Polanharjo; dan (vi) Kecamatan Tulung. Sedang kecamatan yang Sub IPW mengalami penurunan secara absolut adalah: (i) Kecamatan Kalikotes; (ii) Kecamatan Klaten Tengah; dan (iii) Kecamatan Klaten Utara. Kecamatan yang lainnya, yaitu sejumlah 17 kecamatan mempunyai Sub IPW yang naik turun.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah di Kabupaten Klaten yang dikaitkan dengan upaya untuk selalu meningkatkan Sub IKP secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang berarti selama tahun 2001-2003. Seperti pada indeks dan sub indeks sebelumnya, nilai KV (Koefisien Variasi) juga ada kecenderungan yang semakin menurun, yaitu dari sebesar 0,7203 (atau sebesar 72,03%) pada tahun 2001; turun menjadi sebesar 0,7080 (atau sebesar 70,80%) pada tahun 2002; serta turun lagi menjadi 0,6055 (atau sebesar 60,55%) pada tahun 2003. Dengan tidak signifikannya uji F, maka secara statistik tidak ditemukan adanya kebijakan pembangunan di Kabupaten yang berbeda secara meyelok dari waktu ke waktu.

#### **4. Sub IKM (Indeks Keberdayaan Masyarakat)**

Seperti yang telah dirumuskan dalam Gambar 2.2, besaran Sub IKM merupakan hasil dekomposisi dari 3 (tiga) Sub Indeks, yaitu: (i) Sub IKK (Indeks Kependudukan dan Ketenagakerjaan); (ii) Sub ISM (Indeks Kesejahteraan Masyarakat); dan (iii) Sub ISB (Indeks Kondisi Sosial Politik dan Budaya). Dari hasil perhitungan atau uji-F (*F-test*) didapatkan nilai sebesar 2,3149; dan tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk Sub IKM di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten secara statistik tidak mengalami perbedaan selama 3



(tahun) berturut-turut, yaitu tahun 2001; 2002; dan 2003. Secara umum memang tidak terjadi perbedaan yang menyolok dalam rerata indeksinya, yaitu dari sebesar 0,8436 pada tahun 2001; naik menjadi sebesar 0,8795 pada tahun 2002; dan turun lagi menjadi sebesar 0,6534 pada tahun 2003. Hal ini mengindikasikan bahwa dibanding tahun 2001, Sub IKM pada tahun 2003 lebih buruk dan secara statistik juga tidak signifikan.

Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Selatan; Kecamatan Klaten Tengah, dan Kecamatan Prambanan; merupakan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Klaten yang selama periode 2001-2003 masuk dalam kategori atau peringkat 5 (lima) besar dalam Sub IPW. Keempat kecamatan ini, masuk dalam kategori kecamatan-kecamatan yang sudah maju dan terletak di kawasan perkotaan, kecuali di sebagian besar desa-desa di Kecamatan Prambanan. Kecamatan Prambanan, merupakan kecamatan yang sangat menyolok dalam hal Sub IKM ini, karena pada IPD Total dan Sub IKP berada pada peringkat bawah, sedang untuk Sub IPW berada pada tingkat menengah. Sementara itu, Kecamatan Tulung dan Kecamatan Gantiwarno masuk dalam kategori kecamatan dengan Sub IKM yang rendah. Kecamatan Tulung pada tahun 2001 berada pada peringkat ke-22, sedang pada tahun 2002 dan 2003 turun ke peringkat 26 (paling akhir). Sedang untuk Kecamatan Gantiwarno, selama 3 tahun berturut-turut berada pada peringkat ke-24.

Dibanding dengan tahun 2001, tahun 2003; semua besaran indeks secara absolut (nilai mutlak) mengalami penurunan di semua kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang pada tahun 2002 besaran indeks absolutnya melebihi tahun

2001 secara meyelok adalah: (i) Kecamatan Prambanan; (ii) Kecamatan Wonosari; (iii) Kecamatan Jatinom; (iv) Kecamatan Klaten Selatan; dan (v) Kecamatan Klaten Utara.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah di Kabupaten Klaten yang dikaitkan dengan upaya untuk selalu meningkatkan Sub IKM secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang berarti selama tahun 2001-2003. Tidak seperti pada indek dan sub indeks sebelumnya, nilai KV (Koefisien Variasi), kecenderungannya mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 0,4483 (atau sebesar 44,83%) pada tahun 2001; naik menjadi sebesar 0,5260 (atau sebesar 52,60%) pada tahun 2002; serta naik kembali menjadi 0,5733 (atau sebesar 57,60%) pada tahun 2003. Dengan tidak signifikannya uji F, maka secara statistik tidak ditemukan adanya kebijakan pembangunan di Kabupaten yang berbeda secara meyelok dari waktu ke waktu.

## KESIMPULAN

Dari rangkaian analisis yang telah dilakukan dibagian sebelumnya, maka beberapa simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Dari hasil perhitungan IPD (Indeks Pembangunan Daerah) Total, yang merupakan dekomposisi dari (i) Sub IKP (Indeks Kapasitas Pemerintahan); (ii) Sub IPW (Indeks Perkembangan Wilayah); dan (iii) Sub IKM (Indeks Keberdayaan Masyarakat); dapat dilihat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut telah terjadi peningkatan dalam IPD Total di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten. Secara umum juga dapat diungkapkan bahwa besarnya IPD Total disumbangkan oleh sebagian besar dari Sub IKP (Indeks



Kapasitas Pemerintahan). Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan nilai IPD Total yang pergerakan indeks-indeksnya searah dengan pergerakan Sub IKP. Dari rerata IPD Total yang besarnya adalah 3,5349 (tahun 2001); menjadi sebesar 4,0754 (tahun 2002); dan meningkat menjadi 4,7643 (tahun 2003); sumbangan dari Sub IKP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah sebesar 7,9010 (tahun 2001); menjadi sebesar 9,3208 (tahun 2002); dan sebesar 11,5829 (tahun 2003). Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Selatan; Kecamatan Klaten Tengah, dan Kecamatan Delanggu; merupakan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Klaten yang selama periode 2001-2003 masuk dalam kategori atau peringkat 5 (lima) besar IPD Total. Sedang Kecamatan Wedi dan Kecamatan Prambanan masuk dalam kategori kecamatan dengan IPD Total yang rendah. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa IPD Total yang besar terletak pada kecamatan-kecamatan yang mempunyai corak perkotaan, sedang kecamatan-kecamatan dengan IPD Total rendah mempunyai corak perdesaan yang masih sangat kental.

b. Dari hasil perhitungan Sub IKP (Indeks Kapasitas Pemerintah), yang merupakan hasil dekomposisi dari 3 (tiga) Sub Indeks, yaitu: (i) Sub IKA (Indeks Kapabilitas Aparat); (ii) Sub IKD (Indeks Keuangan Daerah); dan (iii) Sub ISP (Indeks Sarana dan Prasarana Pemerintahan). Dari hasil perhitungan atau uji-F (*F-test*) didapatkan nilai sebesar 10,4332; dan signifikan pada taraf 1% (tingkat kebenaran 99%); dapat dilihat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut telah terjadi peningkatan dalam Sub IKP, yaitu dari sebesar 7,9010 (tahun 2001); menjadi sebesar 9,3208 (tahun 2002); dan sebesar 11,5829 (tahun 2003). Kecamatan Klaten Utara,

Kecamatan Klaten Selatan; Kecamatan Delanggu, dan Kecamatan Klaten Tengah; merupakan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Klaten yang selama periode 2001-2003 masuk dalam kategori atau peringkat 5 (lima) besar dalam Sub IKP. Sementara, Kecamatan Wedi dan Kecamatan Prambanan masuk dalam kategori kecamatan dengan Sub IKP yang rendah. Sehingga secara umum juga dapat disimpulkan bahwa Sub IKP yang besar juga terletak pada kecamatan-kecamatan yang mempunyai corak perkotaan, seperti yang terjadi pada penjelasan IPD Total.

c. Dari hasil perhitungan Sub IPW (Indeks Perkembangan Wilayah) yang merupakan hasil dekomposisi dari: (i) Sub IFP (Indeks Fasilitas Publik); (ii) Sub IEW (Indeks Ekonomi Wilayah); dan (iii) Sub IFL (Indeks Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan SDA); dapat dilihat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak terjadi peningkatan dalam rerata Sub IPW, yaitu dari sebesar 1,5283 (tahun 2001); naik menjadi 1,6426 (tahun 2002); dan turun menjadi 1,4338 (tahun 2003). Hal ini mengindikasikan bahwa Sub IPW pada tahun 2003 lebih rendah dibanding dengan Sub IPW tahun 2001. Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Utara; Kecamatan Ceper, dan Kecamatan Klaten Selatan; merupakan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Klaten yang selama periode 2001-2003 masuk dalam kategori atau peringkat 5 (lima) besar dalam Sub IPW. Sedang Kecamatan Jatnom dan Kecamatan Ngawen masuk dalam kategori kecamatan dengan Sub IPW yang rendah. Kecamatan Ngawen pada tahun 2001 dan 2002 berada pada peringkat ke-22, sedang pada tahun 2003 turun ke peringkat 24. Sedang untuk Kecamatan Jatnom tahun 2001 dan 2003 berada pada peringkat ke-



25, meskipun pada tahun 2002 sempat berada pada peringkat ke-24.

d. Dari hasil perhitungan Sub IKM (Indeks Keberdayaan Masyarakat) yang merupakan hasil dekomposisi dari: (i) Sub IKK (Indeks Kependudukan dan Ketenagakerjaan); (ii) Sub ISM (Indeks Kesejahteraan Masyarakat); dan (iii) Sub ISB (Indeks Kondisi Sosial Politik dan Budaya); dapat dilihat bahwa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak terjadi perbedaan yang menyolok dalam rerata indeksinya, yaitu dari sebesar 0,8436 (tahun 2001); naik menjadi 0,8795 (tahun 2002); dan turun menjadi 0,6534 (tahun 2003). Hal ini mengindikasikan bahwa dibanding tahun 2001, Sub IKM pada tahun 2003 lebih buruk dan secara statistik juga tidak signifikan. Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Selatan; Kecamatan Klaten Tengah, dan Kecamatan Prambanan; merupakan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Klaten yang selama periode 2001-2003 masuk dalam kategori atau peringkat 5 (lima) besar dalam Sub IKM. Keempat kecamatan ini, masuk dalam kategori kecamatan-kecamatan yang sudah maju dan terletak di kawasan perkotaan, kecuali di sebagian besar desa-desa di Kecamatan Prambanan. Kecamatan Prambanan, merupakan kecamatan yang sangat menyolok dalam hal Sub IKM, karena pada IPD Total dan Sub IKP berada pada peringkat bawah, sedang untuk Sub IPW berada pada peringkat menengah. Sedang Kecamatan Tulung dan Kecamatan Gantiwarno masuk dalam kategori kecamatan dengan Sub IKM yang rendah. Kecamatan Tulung pada tahun 2001 berada pada peringkat ke-22, sedang pada tahun 2002 dan 2003 turun ke peringkat 26 (paling akhir). Di lain pihak, Kecamatan

Gantiwarno selama 3 tahun berturut-turut berada pada peringkat ke-24.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Departemen Pendidikan Nasional melalui Proyek Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 033/SPPP/PP-PM/DP3M/IV/2005, tanggal 11 April 2005. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah memungkinkan diselesakannya studi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, M.Syahbudin Latief, Agus Heruanto Hadna dan Riza Noer Arfani. (2003). **Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerinatahan dan Otonomi Daerah**. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Anwar, Moh. Arsjad. (1995). "Definisi Operasional tentang Pembangunan Eko-nomi Negara Sedang Berkembang". **Supplement Mata Kuliah Pereko-nomian Indonesia** pada Program Pascasarjana Bidang Ekonomi Universitas Indonesia.



- Arief Ramelan Karseno. (2000). "Persoalan-Persoalan dalam Implementasi Otonomi Daerah", **Makalah** disampaikan pada Seminar Otonomi Daerah, yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi UNS, Surakarta: 08 April.
- Bank Dunia. (2001). **The Quality of Growth (Kualitas Pertumbuhan)**, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2001) "Indeks Pembangunan Daerah (*Regional Development Index*)". Draft/Rancangan dalam Bentuk Ringkasan yang Diterbitkan oleh Bappenas di Jakarta, pada 29 Oktober 2001.
- Bappedal (Badan Perencanaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan) Kabupaten Klaten [dokumen-dokumen tanpa judul].
- BPS dan Bappeda Propinsi Jawa Tengah. (beberapa terbitan). **Jawa Tengah Dalam Angka**. Jawa Tengah : BPS dan Bappeda.
- Bappeda Kabupaten Klaten (2002). **Analisa Potensi Wilayah Kabupaten Klaten (2001)**. Klaten: Bappeda.
- \_\_\_\_\_ (beberapa terbitan). **Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Kabupaten Klaten**. Klaten: Bappeda Kabupaten Klaten.
- \_\_\_\_\_ (2004). **Review Program Pembangunan (PROPEDA)**
- Kabupaten Klaten Tahun 2001-2005**. Klaten: Bappeda Kabupaten Klaten.
- BPS dan Bappeda Kab. Klaten. (beberapa terbitan). **Kabupaten Klaten Dalam Angka**. Klaten: BPS dan Bappeda.
- \_\_\_\_\_ (beberapa terbitan). **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan dan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Klaten**. Klaten: BPS dan Bappeda.
- Dick, Howard; James J.Fox; dan Jamie Mackie; Editor. (1997). **Pembangunan Yang Berimbang Jawa Timur dalam Era Orde Baru**, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dirjen Otda Depdagri dan Bappenas. (2002). **Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Mendukung Desentralisasi**. Jakarta: Dirjen Otda Depdagri dan Bappenas.
- Dirjen PKPD Depkeu RI. (2004). **Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal**. Jakarta: Dirjen PKPD.
- \_\_\_\_\_ (2004). **Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003**. Jakarta: Dirjen PKPD.
- Djarwanto PS. (1992). **SOAL-JAWAB STATISTIK: Bagian Statistik Induktif**, Edisi Kedua, Cetakan Pertama.



- Yogyakarta: Penerbit LIBERTY.
- Dunn, William N. (2001). *Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.
- Eko W. Suwardyono. (2000). "Kesiapan Jawa Timur Dalam Proses Desentralisasi Fiskal: Suatu Kajian Pendahuluan". Paper dipresentasikan dalam Lokakarya Nasional *Strengthening the University Capacity to Support Decentralization*, Jakarta, 5-10 Juni.
- Fahmi Wibawa dan Moch. Yunus (Editor). (2004). *Inovasi sebagai Referensi (Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award)*, Cetakan Pertama. Surabaya: Jawa Post Institute of Pro-Otonomi.
- Hera Susanti, Moh Ikhsan M. dan Widyanti. (1995). *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Jakarta: LP FE UI dan LPEM FE UI.
- Irawan Kadiman. (2001). *Konsep dan Indikator Pembangunan*. Bahan Ajar Diklatpim. Tingkat IV. Jakarta: Penerbit LAN RI.
- Kahlil Rowter (1996). "Indikator-Indikator Sosial Ekonomi". Bahan-bahan yang disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan di LPEM FE UI. Jakarta.
- Kepolisian Resort Kabupaten Klaten [dokumen-dokumen tanpa judul].
- Mashuri dan Syarif Hidayat, Editor. (2001). *Menyikap Akar Persoalan Ketimpangan Ekonomi di Daerah: Sebuah Kajian Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Damator.
- Pusat Kajian Pemerintahan STPDN. (2002). *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan*. Bandung: Penerbit Citra Pindo.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*. Bandung: Penerbit Fokusmedia.
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. (2002). *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-UGM.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten [dokumen-dokumen tanpa judul].
- Suseno Triyanto Widodo. (1990). *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Per-ekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia  
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2004 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomer 33 Tahun 2004, tentang  
Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan  
Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor  
126, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 4438);